

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar : 2001, hlm. 180-181.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Madar Maju, Bandung, 2008, hlm 93
- Jimly Asshidiqie *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, hlm. 31
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT. Kanisius : 2020, hlm. 9.
- Masriyani, Islah, Tresya, Nella Octaviany Siregar, *Lembaga Negara Indonesia, Eureka Media Aksara*, Jawa Tengah : Eureka Media Aksara : 2023 hlm. 16.
- Moonti, Roy Marthen. “*Ilmu Perundang Undangan*,” 2019, 1–50.
- Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung: PT. Refika Aditama : 2020, hlm. 8.
- Ni Wayan and Ella Apriyani, “*Impilikasi Surat Edaran Mahkamah Perkara Pinjam Nama Dalam*” 12, no. 10 (2020): 334–44.
- Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung: PT. Refika Aditama : 2020, hlm. 33.
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta: Pustaka belajar : 2005, hlm. 16 -19.
- Nurkthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, edisi ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 14-17.
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan :Teori dan Praktik di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 4, Depok: PT. Rajagrafindo Persada : 2023, hlm. 8.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi ke-18. Jakarta: Kencana: 2023, hlm.137.
- Roy Marthen Moonti, “*Ilmu Perundang Undangan*,” 2019, 1–50. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Saldi Isra Lembaga Negara: *Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Ed. 1, Cet. 2, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021, hlm. 3-8

Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan 1, Malang, Jatim: Setara Press, Kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro : 2021, hlm. 6-7.

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi)* , edisi ke1, Malang, Jatim: Setara Press 2016, hlm. 33-34

B. Jurnal

Andhika Santoso, Raihan, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 07–15. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.

A'an Efendi, “Problematic Penataan Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan,” vol. 5, no. 1, 2019, hlm. 24.

Darmini Roza, Gokma Toni Parlindungan S, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan “, vol. 5, no. 1, *Jurnal Cendekia Hukum*, 2019, hlm. 137-138.

Dinda Amalia Nasution, Friska Rehulina Br Ginting, Hulman Panjaitan, Lennai Situmorang, Rachel Meilisa Pakpahan, Rhyfka Arlina Bago, Yohana Sinurat, Ramsul Nababan, “Efektivitas Hierarki Perundang-undangan di Indonesia”, vol.1, no.1, *Journal of Hadith and Prophetic Tradition*, 2024, hlm. 4-5.

Diah Marla Pitaloka, Benny Djaja, Maman Sudirman, “Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023”, vol.18, no.1, *Yustitia*, 2024, hlm. 59

Diah Marla Pitaloka, Benny Djaja, Maman Sudirman, “Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023” vol.18, no.1, *Yustitia*, 2024, hlm. 61-62.

Dio Siaga Putra, Ansorullah, “Kewenangan Mahkamah Agung dalam Judicial Review terhadap Peraturan Perundang-undangan”, vol. 2, no.1, *Limbago : Journal Of Constitutional Law*, 2022, hlm. 55-56.

- Fadhlin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan , Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 01 no 1 (2021): 43.
- Fadhillatu Jahra Sinaga, Fadhlin Ade Candra, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan , Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 01 no 1 (2021): 43.
- Girianto Edy Purnomo, Anang Dony Irawan, "Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara", vol. 5, no.3, *Media of Law and Sharia*, 2024 hlm. 255.
- Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, no. 7 (2019).
- Maulana Rihdo Al Fasil, Ishaq Maulana Sudur , Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, Fauziyah Putri Meilinda, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif akademisi : Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh terhadap Putusan Hukum", vol.4, no.2, *Usrah*, Oktober 2023, hlm. 234-236.
- M. Afif Gusti Fatah, "Kedudukan SEMA sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim", vol. 07, no.1, *Transparansi Hukum*, 2024, hlm. 135.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*, no. 7 (2019).
- Muhammad Faqih. "Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah Agung Di Indonesia. " *Mimbar Yustitia* 01 no 04 (2020): 31.
- Mukhaimin Sukri and Ridham Priskap, "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perkawinan Beda Agama : Analis Sema Nomor 2 Tahun 2023" 4, no. 2 (2024): 193–204.
- Prianto, Wahyu, Fakultas Hukum, Nahdlatul Ulama, Sulawesi Tenggara, Jl Mayor, Jenderal Katamso, Kec Baruga, and Kota Kendari. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19.
- Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, and Utang Rosidin, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Depositi: Jurnal Publikasi ilmu hukum* 1, no. 4 (2023): 07–15, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.

- Rinsofat Naibaho, Indra Jaya M. Hasibuan, “Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman.”vol. 2, no.2, Nommensen Journal of Legal opinion, Juli 2021, hlm. 212.
- Sukri, Mukhaimin, and Ridham Priskap. “Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perkawinan Beda Agama : Analisis Sema Nomor 2 Tahun 2023” 4, no. 2 (2024): 193–204.
- Utang Rosidin Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Depositi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 01 no 04 (2023): 12.
- Wahyu Prianto et al., “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19.
- Wayan, Ni, and Ella Apriyani. “Implikasi Surat Edaran Mahkamah Perkara Pinjam Nama Dalam” 12, no. 10 (2020): 334–44.
- Yosia Hetharie, “Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing melalui Perjanjian Pinjam Nama sebagai Bentuk Penyeludupan Hukum dalam Hukum Perdata Internasional”, vol.2, no.1, *Balobe Law Journal*, April 2022, hlm. 19

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN.1960/No.104, TLN No.2043, LL SETNEG : 17 HLM.

Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN.1974/No.1, TLN No.3019, LL SETNEG : 26 HLM.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN.1985/No.73, TLN No.3316 : 19 HLM.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, LN.2004/No. 9, TLN No.4359, LL SETNEG : 15 HLM.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN. 2011/No.82, TLN No.5234, LL SETNEG : 51 HLM.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, LN. 2013/No. 232, TLN No. 5475, LL SETNEG : 26 HLM.

D. Website Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-lt5da3d5db300a9/> diakses pada 8 agustus 2024.

<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/>, di akses pada Kamis 26-12-2024 jam 11.06 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>, diakses pada Selasa 21 Januari 2025, Pukul. 00.32 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hierarki>, di akses pada Selasa, 21 Januari 2025, Pukul 01.04 WIB.

<https://kbbi.web.id/hierarki>, di akses pada Selasa, 21 Januari 2025, Pukul 01.08. WIB.